

**FIGHTING THE ISLAMIC RADICALISM MOVEMENT IN SUMENEP THROUGH
EMPOWERING TAKMIR MASJID NU IN FORTING RADICAL ISLAMIC
INFILTRATION**

**MENANGKAL GERAKAN RADIKALISME ISLAM DI SUMENEP MELALUI
PEMBERDAYAAN TAKMIR MASJID NU DALAM MEMBENTENGI INFILTRASI
ISLAM RADIKAL**

Abd. Warits^{1*}, Fathurrosyid²

¹²Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

*Corresponding Author: e-mail: aries.ilham28@gmail.com

Diterima: 15 September 2024, Revisi : 20 November 2024, Terbit:30 November 2024

ABSTRACT

The mosque holds a vital role in Islamic society, serving as the focal point for various activities including worship, religious rituals, education, and other aspects of Islamic culture. It symbolizes the religious identity of a specific community. Consequently, mosques become contested entities, as gaining control over them allows for influence over the surrounding community. This article examines the dedicated efforts to empower mosque activities undertaken by the NU Gapura Branch Management in Sumenep District. The aim is to fortify against the infiltration of Radical Islamic movements, prevalent from the early 2010s to 2020 in several southeastern districts of Sumenep, including Batuputih, Batang-Batang, and Gapura sub-districts. This initiative intends to prevent 'jihadist' activists, who frequent ostensibly inactive mosques, from assuming control. Employing Participatory Action Research (PAR), emphasis is placed on cultivating local leadership. Results include: heightened awareness among mosque administrators regarding the transnational Islamic movement phenomenon with its various forms; the ability to distinguish 'Pure Islam' from politically motivated issues under the guise of upholding Islamic law; instilled nationalism to preserve the Pancasila ideology within the Indonesian framework; proficiency in conducting a SWOT analysis for assessing potential, challenges, threats, and opportunities in mosque management, and the formulation of strategic programs to develop religious activities within the mosque, including mosque libraries, educational institutions, economic ventures, 'kitab kuning' studies, tutoring, and written works for school-aged children.

Keywords: Islamic Radicalism, Mosque Religious Activities, NU Branch Youth

ABSTRAK

Masjid berperan penting bagi masyarakat Islam. Ia menjadi sentral kegiatan dalam segala bidang: peribadatan, ritual keagamaan, pendidikan, kegiatan sosial dan budaya keislaman lainnya. Masjid menjadi simbol dari identitas keberagaman masyarakat tertentu. Maka dari itu, masjid menjadi rebutan sebab dengan menguasai masjid, maka secara otomatis bisa mengendalikan masyarakat di sekitar masjid tersebut. Artikel ini menelaah tentang kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam memberdayakan kegiatan masjid yang dilakukan oleh Pengurus Ranting NU Gapura Kabupaten Sumenep sebagai upaya membentengi infiltrasi gerakan Islam Radikal yang sempat masif pada awal tahun 2010 – 2020 di beberapa daerah

timur daya Kabupaten Sumenep yang mencakup kecamatan Batuputih, Batang – Batang dan Gapura. Kegiatan ini dimaksudkan agar para aktivis “jihadis” yang sering mendatangi beberapa masjid yang tampak sepi kegiatan, tidak memiliki peluang untuk mengambil alih masjid tersebut. Metode pengabdian ini dilakukan dengan Participatory Action Research (PAR) yang menitikberatkan lahirnya local leader. Hasil dari kegiatan ini antara lain: Tumbuhnya kesadaran pada para pengurus masjid tentang fenomena gerakan Islam transnasional dengan ragam variannya; mampu membedakan isu “Islam yang Murni” dengan isu kepentingan politik yang berkedok penegakan syariah Islam; Tertanamnya semangat nasionalisme untuk tetap mempertahankan ideologi Pancasila dalam bingkai keindonesian, Mampu melakukan analisis SWOT untuk mengukur potensi, tantangan, ancaman serta peluang dalam pengelolaan masjid serta Tersusunnya program strategis dalam mengembangkan kegiatan keagamaan masjid; perpustakaan masjid, lembaga pendidikan dan perekonomian, kajian kitab kuning, bimbingan belajar dan karya tulis bagi anak-anak usia sekolah.

Kata Kunci: Radikalisme Islam, Kegiatan Keagamaan Masjid, Anak Ranting NU

1. Pendahuluan

Setiap orang sepakat bahwa masjid memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat luas, dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dengan latar belakang dan tradisi yang berbeda-beda (Rusmiati, 2022). Masjid menjadi sentral kegiatan umat Islam di segala bidang (Az et al., 2024), mulai dari peribadatan, peringatan hari besar, pengajaran Islam dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat luas (Danarahmanto et al., 2022).

Secara teoritis, masjid memiliki peran sangat penting bagi masyarakat muslim sejak periode nabi Muhammad Saw. dan sejak masa awal eksistensi masyarakat muslim di Madinah. Ketika hijrahnya dari Makkah ke Madinah, ia membangun masjid sebagai upaya konkret yang pertama bagi peradaban Islam (Utami et al., 2024). Sejak periode penting ini masjid yang ia bangun dipandang sebagai pusat utama bagi beragam aktivitas masyarakat muslim. Dengan kata lain masjid menjadi pusat komunitas dan naungan bagi segala bentuk program dan aktivitas sosial dan pendidikan masyarakat muslim.

Umumnya, Masjid sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah yang selama ini biasa dijadikan pusat peribadatan. Namun dalam perkembangannya masjid tidak hanya dijadikan tempat shalat namun juga menjadi tempat untuk membahas berbagai problematika kehidupan sosial, sekaligus merawat dan mengembangkan tradisi keagamaan yang selama ini mereka yakini (Fathurrohman et al., 2024).

Namun dalam perkembangannya, rupanya masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah. Masjid juga memiliki peran sosial (Az et al., 2024), peran pendidikan (Falah et al., 2022), peran ekonomi (Faizal et al., 2023), bahkan peran politik pemerintahan (Darmawan & Marlin, 2020). Masjid menjadi pusat segala aktivitas umat Islam untuk membahas segala apa pun yang berkaitan dengan problem keumatan. Setidaknya hal itulah yang berlangsung di zaman Nabi sampai masa khulafah al- Rasyidin (Utami et al., 2024).

Bahkan terkadang keberadaan masjid lebih menonjol dalam fungsi sosialnya, atau dalam waktu lain fungsi politik atau budaya yang kadang-kadang lebih menonjol. Masjid juga bisa digunakan sebagai basis perjuangan politik, untuk mempertahankan eksistensi Islam. Bahkan pada era otonomi daerah di Indonesia, masjid ada yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk alat perjuangan partai tertentu (Aula, 2023). Dengan demikian, jelas bahwa seiring perkembangan zaman masjid memiliki multifungsi yang sangat penting dan strategis bagi umat Islam sejak dulu sampai sekarang.

Disamping itu, Masjid memainkan peran yang sangat besar dalam penyebaran pendidikan dalam Islam. Keterhubungan masjid dengan pendidikan senantiasa menjadi salah

satu karakteristik utama sepanjang sejarah. Sejak awal, masjid merupakan pusat komunitas Islam (Az et al., 2024), sebuah tempat untuk doa, meditasi, pengajaran agama, diskusi politik, dan proses pendidikan. Atas berbagai ungkapan tersebut dapat kita bayangkan betapa besar peranan masjid dalam perkembangan kehidupan masyarakat baik yang berkenaan dengan aspek peribadatan maupun sosial bahkan aspek politik.

Untuk itu, berbagai organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah senantiasa berupaya “memakmurkan” masjid dengan berbagai kajian keagamaan. Mereka memusatkan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan tradisi keagamaan seperti perayaan hari-hari besar Islam, Dakwah Islamiyah dan juga program pembelajaran di Masjid. Bahkan tidak hanya itu, NU dan Muhammadiyah maupun berbagai ormas lain berupaya “menampakkan” simbol-simbol keormasan pada beberapa masjid tertentu, sehingga masjid tersebut dikenal sebagai masjid NU maupun masjid Muhammadiyah.

Namun dalam perkembangannya, Masjid menjadi semakin sepi, hanya menjadi tempat Shalat saja, itu pun dengan jumlah jamaah sedikit dan sudah “sepuh” semua (Ni'mah, 2021). Ibaratnya, masjid hanya cocok ditempati orang-orang yang sudah siap-siap menunggu panggilan malaikat maut, sementara mereka yang muda, tubuhnya yang masih energik merasa tidak cocok (tidak perlu) berada di masjid karena masa pertobatan masih panjang.

Maka terjadilah manajemen pengelolaan masjid semakin tidak menarik, tidak ada inovasi kreatif untuk mengembangkan peradaban masyarakat. Obrolan di masjid pun hanya sebatas pertobatan dan dosa-dosa, isu yang sama sekali tidak menarik bagi kalangan pemuda. Masjid hanya didominasi oleh generasi tua yang tidak punya aktivitas lain kecuali hanya menyesali perbuatan dosa di masa lalu.

Pada dasarnya fungsi masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan aktivitas sosial. Kegiatan pemberdayaan komunitas umat Islam dapat dilakukan dengan memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas utama kemasyarakatan (Masamah, 2020). Pemberdayaan masjid dengan mengembangkan SDM takmir masjid melalui pendampingan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran, serta membina aspek pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa memaksimalkan sumber-sumber produktif untuk kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat (Rusmiati, 2022).

Rupanya, hal ini telah disadari sejak awal oleh kegiatan gerakan Islam Radikal yang tergabung dalam eks HTI, eks FPI beberapa organisasi sealiran lainnya, sehingga mereka selalu memusatkan kegiatan “dakwahnya” dengan memakmurkan masjid yang selama ini; harus diakui, telah lalai dilakukan oleh kalangan NU (Shorfana, 2024).

Gerakan HTI sebagai manifestasi gerakan Islam Transnasional yang berpaham Radikal telah masif menguasai berbagai masjid di Indonesia untuk memudahkan tercapainya tujuan mereka, menegakkan sistem ad-daulah al-Islâmiyyah dengan sistem khilâfah (Manik & Hasanuddin, 2018). Tindakan itu, tentunya dapat berpotensi merusak tatanan kenegaraan Indonesia yang diperjuangkan susah payah oleh para ulama dan para pejuang kemerdekaan NKRI.

Hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bekerja sama dengan Rumah Kebangsaan (RK) yang dirilis pada 8 Juni 2018 lalu menguatkan temuan ini. Mereka menyebutkan bahwa dari 100 masjid dilingkungan Kementerian, Lembaga dan BUMN telah “disusupi” oleh gerakan Islam Radikal. 42,34% konten radikal berupa ujaran kebencian, sikap negatif terhadap kepemimpinan perempuan dan sikap negatif terhadap agama lain menjadi topik utama dalam setiap khotbah keagamaan (Gaus AF, 2019).

Penelitian lain dilakukan oleh Khamami Zada yang menjelaskan tentang gerakan Islam radikal yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) (Zada, 2011). Khamami Zada menjelaskan model gerakan politik gerakan Islam radikal yang meliputi relasi Islam dan negara,

Islam dan demokrasi, negara Islam, syariat Islam dan presiden wanita. Ia menelaah agenda politik dan fokus gerakan masing-masing organisasi tersebut mulai: pemberantasan tempat maksiat, konflik agama dan solidaritas dunia Islam, politik Islam dan kebijakan pemerintahan. Penelitian ini juga menarik namun sayangnya tidak mengilustrasikan tentang model dakwah mereka dalam “menyusupi” kehidupan masyarakat.

Disamping itu, penelitian Erni Sari Dwi Devi Lubis tentang Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia dengan gamblang menjelaskan bahwa gerakan mereka memang fokus di berbagai masjid, terutama masjid-masjid pemerintahan, perumahan dan kampus-kampus umum (Lubis, 2015). Tanpanya, masjid sebagai tempat ibadah memang menjadi target utama gerak mereka untuk menanamkan pemahaman radikal bagi masyarakat. Dengan menguasai masjid, mereka akan semakin mudah menanamkan “kebencian” dengan bungkus ajaran agama.

Salah satu daerah yang mulai dikuasai oleh orang-orang HTI dengan “merampas” beberapa masjid-masjid ditengah-tengah masyarakat adalah kecamatan Batang-Batang dan Sebagian di Kecamatan Gapura. Di daerah ini, setidaknya sudah ada belasan masjid yang dikuasai oleh orang HTI. Salah satu pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Batang-Batang, Adi Purnomo menceritakan bahwa beberapa masjid di batang-batang sudah mulai berani “membid’ahkan” Isra’Mi’raj, Maulid bahkan menolak Tahlil dengan terang-terangan.

Bahkan di beberapa tempat tersebut, secara terbuka pernah melakukan khalaqah tentang pentingnya menegakkan Khilafah di Indonesia. “bila hal ini dibiarkan, bukan mustahil bila semua masyarakat di daerah tersebut akan menyetujui konsep Khilafah sebagai dasar negara ini, dan ini membahayakan terhadap NKRI” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.

Merespon hal tersebut, Khairul Umam, salah satu pengurus PCNU Sumenep yang sebelumnya mencatat sebagai Sekretaris MWC NU Gapura menegaskan bahwa NU harus mulai lebih serius “menjaga” dan memakmurkan masjid. Orang-orang HTI selama ini memang masif “mendampingi” berbagai kegiatan di masjid-masjid seperti dalam peribadatan dan pendidikan, setelah keberadaan mereka diakui dan mendapatkan “hati” masyarakat maka mereka mulai memasukkan ajaran-ajaran “Islam Transnasional dan Radikalisme” terutama yang berkaitan dengan konsep Khilafah bagi masyarakat sekitar.

Atas keadaan ini, maka MWC NU Gapura bergerak cepat. Sejak awal tahun 2019 lalu, telah membentuk kepengurusan Anak Ranting MWC NU yang berkedudukan di setiap Masjid yang ada di seluruh wilayah MWC NU Gapura, dan puncaknya pada awal April 2023 sedikitnya 92 kepengurusan Anak Ranting MWC NU yang bertugas mengelola kegiatan masjid. Dengan demikian, adanya kepengurusan Anak Ranting MWC NU tersebut dapat membentengi gerakan Islam Transnasional yang selama ini kian masif masuk ke pelosok masyarakat melalui penguasaan-penguasaan masjid.

Atas dasar fenomena tersebut maka pengabdian ini penting untuk dilakukan dengan fokus pada Bagaimana kondisi Anak Ranting MWC NU dalam mengelola kegiatan masjid untuk mengantisipasi gerakan Islam Radikal, dan apa dampak dari kegiatan pengabdian ini terhadap manajerial pengelolaan masjid di masyarakat Gapura. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan penyadaran tentang bahaya ajaran Islam radikal dengan segala varian gerakannya, serta memberikan edukasi tentang pentingnya “memakmurkan” masjid dengan berbagai kegiatan menarik sehingga mempersatukan masyarakat muslim.

2. Metode

Metode pengabdian ini akan dilaksanakan dengan model pendampingan terhadap Pendampingan dan Pemberdayaan Pengelolaan Kegiatan Keagamaan Masjid berbasis NU dengan metode Participatory Action Research (PAR). PAR dikenal sebagai metode dan strategi yang tepat untuk mewujudkan harapan dampingan (Chevalier & Buckles, 2019). Melalui PAR, proses dampingan akan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan sebab diarahkan untuk

melahirkan local leader yang bertugas untuk melanjutkan kegiatan tersebut pasca program dampingan ini selesai (PAR, n.d.).

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan mengorganisir masyarakat dengan membentuk lokal leader untuk terlibat aktif dalam merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya (Rusmiati, 2022). Tim Pengabdian berperan tidak hanya sebagai pihak luar yang hanya ikut serta membantu dan mengarahkan masyarakat untuk bergerak, namun melebur dalam komunitas sehingga terbangun kerjasama intensif dan masif untuk mengembangkan komunitas dampingan.

Kegiatan pengabdian ini bertempat di kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan melibatkan pengurus anak ranting NU MWC Gapura yang berkedudukan di masing-masing Masjid yang ada di seluruh Kecamatan Gapura sebagai subjek utama pendampingan. Kegiatan ini melibatkan pengurus harian MWC NU, terutama Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU) yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan masjid. Kegiatan ini juga melibatkan aliansi kiai muda NU Sumenep sebagai tim sharing informasi dan isu-isu gerakan Islam Transnasional. Posisi mereka sebagai putra kiai-kiai berpengaruh di Sumenep membuat masyarakat subjek dampingan mudah diajak kerjasama untuk membentengi gerakan Islam Transnasional. Pihak lain yang terlibat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Instika yang berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelatihan manajerial mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di masjid-masjid tersebut.

Sedangkan Proses perencanaan dan strategi kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan penyadaran untuk membangun kesamaan persepsi tentang bahaya gerakan radikal dan intoleran yang berpotensi menimbulkan perpecahan, serta siapa saja dan bagaimana modus kelompok "jihadis" dalam melancarkan aksi di beberapa masjid.
2. Memaksimalkan peran komunitas. MWC NU Gapura telah membentuk 92 kepengurusan Anak Ranting NU yang bertugas untuk merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap masjid yang ada ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan mereka merupakan modal besar untuk membentengi kedatangan pihak-pihak yang ingin "mencaplok" masjid-masjid NU di Kabupaten Sumenep.
3. Pendampingan Terlibat. Tingkat pengetahuan objek dampingan tentang kegiatan manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi harus diakui sangatlah minim. Maka dari itu, tim pengabdian melibatkan secara utuh untuk berkolaborasi dengan objek dampingan dalam menelaah, merumuskan program unggulan serta proses pelaksanaan beberapa kegiatan keagamaan sehingga dapat membangkitkan ghirah masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan keagamaan di masjid.
4. Pembangunan jaringan kerja. Salah satu kelemahan tata kelola masjid berbasis NU pada tingkat pedesaan adalah minimnya kerjasama yang berjejaring. Mereka lebih nyaman bekerja sendiri; meski kegiatan yang dilakukan itu sama. Untuk itu, melalui kegiatan pengabdian ini telah terbangun pola kerjasama antara pengurus Anak Ranting MWC NU sehingga nantinya dapat terjalin kegiatan bersama yang lebih semarak.
5. Penguatan ekonomi. Sejatinya, masjid memiliki potensi perekonomian yang cukup besar. Namun sayangnya, bila ada kegiatan perekonomian di masjid seakan-akan "menodai" kesucian masjid. Maka dari itu tidak heran bila selama ini, banyak masjid terutama ditingkat pedesaan sangat lemah dalam tata kelola keuangan. Maka dari itu, Tim pengabdian telah melakukan dampingan dalam bidang penguatan ekonomi; bukan dalam hal bisnis berorientasi profit, namun untuk mengembangkan Kas Masjid sehingga mereka dapat mengatur

dan mengembangkan potensi perekonomian dengan harapan dapat mengelola keuangan secara mandiri.

Tabel 01
Siklus Kerja PAR dalam Pendampingan Masjid Berbasis NU



Sedangkan strategi pengabdian dilakukan dalam beberapa kegiatan berikut:

1. Melaksanakan Pelatihan Manajerial agar pengurus ranting NU mereka memiliki kecakapan untuk menelaah, merumuskan dan mengevaluasi setiap kegiatan keagamaan yang akan dilakukan. Dengan demikian, maka masjid-masjid tersebut diharapkan memiliki kegiatan menarik baik yang berkaitan dengan peribadatan, pendidikan
2. Sharing Knowledge dan FGD. Masyarakat bukanlah objek kosong tanpa pengetahuan. Maka dari itu diperlukan sharing pengetahuan dan informasi mengenai berbagai hal sehingga masyarakat memiliki wawasan luas, terutama yang berkaitan dengan gerakan Islam Transnasional. Melalui kegiatan yang nantinya akan dibentuk melalui Focus Grup Discusion (FGD) tim pengabdian melibatkan diri dengan masyarakat dalam menelaah problem, merumuskan program unggulan sampai terselenggaranya beberapa kegiatan yang telah dirancang.
3. Advokasi dan jaringan kerja. Diakui atau tidak, bahwa gerakan Islam transnasional telah masif di Indonesia. Gerakan mereka tidak hanya ada di kota-kota besar, namun juga merambah ke perkampungan, bahkan telah menyusup ke beberapa lembaga pemerintahan tertentu. Maka untuk menghadapi gerakan yang masif itu dibutuhkan jejaring kinerja yang bisa tekanan dan pengaruh agar bisa lahir berbagai kebijakan yang bisa menghambat ruang gerak mereka, dan kemudian diimbangi dengan penyadaran

dan pemberdayaan agar subjek dampingan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu keislaman yang sarat dengan kepentingan kelompok tersebut.

Tim pengabdian tidak menjadikan masyarakat sebagai target semata, namun diposisikan sebagai mitra yang punya keahlian, cara pandang, dan pihak yang paling menguasai terhadap semua problem yang sedang mereka hadapi. Merekalah yang mengetahui potensi, kekurangan, serta tantangan yang akan mereka hadapi. Tim pengabdian dalam hal ini bertugas untuk membantu mereka menyadarkan, merumuskan dan mengorganisasikan seluruh aset untuk dikembangkan secara sempurna sehingga nantinya bisa melahirkan produk unggulan sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Hasil Pelaksanaan Persiapan Kegiatan

Sebelum melaksanakan program pengabdian dalam mendampingi pengurus anak ranting MWC NU Gapura, tim pengabdian terlebih dahulu telah melakukan survei terkait problematika dan potensi komunitas dampingan. Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan beberapa fakta berikut:

1. Telah terbentuk sebanyak 52 pengurus anak ranting MWC NU Gapura yang berkedudukan di setiap masjid yang ada pada masing-masing dusun pemerintahan desa Kecamatan gapura. Secara garis struktural, pengurus anak ranting NU berada dalam binaan pengurus ranting yang berkedudukan di tingkatan desa.
2. Pengurus anak ranting NU rata-rata adalah pengurus takmir dengan rentang usia 40 - 50 tahun ke atas. Secara usia, mereka telah masuk kategori seneor dan matang. Namun disisi lainnya, justru pada usia matang seseorang cenderung merasa nyaman dan menganggap bahwa setiap kejadian telah berlangsung sesuai dengan semestinya. Kondisi inilah yang terjadi pada (nyaris) setiap pengurus anak ranting NU di kecamatan Gapura dalam mengelola masjid. Maka tidak heran, jika kegiatan masjid anak ranting NU di Gapura monoton, hanya berupa: pembacaan yasin, shalawatan, dan tadarus al-qur'an.
3. Para pengurus anak ranting NU tersebut, mayoritas adalah para kiai kampung¹ yang terkesan "polos" dan "jujur" sehingga jarang mengetahui tentang gerakan infiltrasi islam radikal.
4. Para pengurus anak ranting tersebut belum memiliki kemampuan manajerial mumpuni dalam mengelola kegiatan masjid.²
5. Terdapat indikasi infiltrasi Front Pembela Islam (FPI),³ yang dianggap sebagai bagian gerakan Islam Radikal telah menysasar banyak kiai kampung di Kecamatan Gapura yang tiada lain merupakan basis kultural NU.

¹ Kiai Kampung adalah adalah tokoh-tokoh agama di desa-desa yang biasanya menjadi guru ngaji, memiliki surau/langgar/musala, pengurus takmir masjid, atau memiliki pesantren yang kecil. KH. Abdullah Faqih dalam Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/8594/menolak-istilah-kiai-khas-dan-kiai-kampung>. Istilah "kiai Kampung" diperkenalkan oleh Gusdur pada dekade 2007 lalu untuk menggambarkan adanya fenomena "kesenjangan" komunikasi antara kiai dengan masyarakat. Saat ini, kiai dirasa lebih condong berkomunikasi dengan para penguasa sehingga kehilangan waktu untuk mendengar keluh kesah masyarakat luas. Kondisi ini telah menggeser peran ulama yang sebelumnya sering terlihat dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat merasakan langsung "penderitaan" yang mereka alami. Bisa diakses pada <https://www.nu.or.id/post/read/80110/hakikat-kiai-kampung>. Diakses pada 01 Novembr 2023

² Hasil wawancara dengan Khairul Umam, PC NU Sumenep. 11 September 2023

³ Meksi menuai kontroversi, Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang beberapa waktu lalu telah dibubarkan pemerintah; yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab dianggap bagian dari Ormas Radikal. Kontroversi ini terjadi karena dalam banyak kesempatan FPI mengaku sebagai bagian dari

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan temuan data awal dan hasil FGD tersebut, lalu diputuskan beberapa kegiatan berikut:

1. **Melakukan Pendidikan Penayadaran** melalui FGD dengan Pengurus Ranting NU, LTM MWC NU, dan Aliansi Kiai Muda Sumenep membahas tentang Bahaya Gerakan Islam Radikal dan Pentingnya Manajemen Pengelolaan Kegiatan Masjid berbasis kebutuhan masyarakat.
2. **Melaksanakan pelatihan Analisis SWOT** sehingga LTM NU bersama PR NU bisa memetakan kekuatan dan potensi unggulan yang dimilikinya, merumuskan peluang, menganalisis tantangan dan kelemahan sehingga nantinya mereka menyusun program strategis guna mengoptimalkan kegiatan masjid dalam bingkai pemberdayaan masyarakat baik yang bernilai ideologis, maupun ekonomi yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan.
3. **Pendampingan Terlibat** dengan memberikan pelatihan intensif tentang manajemen kegiatan masjid sampai mereka punya program unggulan pada masing-masing Masjid yang dikelolanya.

Dampak Kegiatan

Dari berepa kegiatan tersebut, didapat beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Tertanamnya kesadaran tentang bahaya Infiltrasi Islam Radikal
2. Pengurus Anak Ranting NU menyadari tentang perbedaan isu Keislaman dan Isu Politik yang dibungkus dengan dalil-dalil keamgaan.
3. Tersusunnya dokumen Hasil Analisis SWOT terhadap Kondisi Pengurus Anak Ranting MWC NU Gapura
4. Program Unggulan masing-masing Pengurus Anak Ranting NU, meliputi:
 - a. **Bidang Ubudiyah** (optimalisasi shalat berjamaah 5 waktu; Pembacaan Surat Yasin dan Pembacaan Tahlil mingguan; Istighasah bulanan; Pembacaan shalawat nariyah mingguan; Pembacaan barzanji mingguan; Tadarus al-Qur'an harian
 - b. **Bidang Ekonomi** (Jariah penanaman pohon pisang; Iuran Hasil Panen; Infaq Koin Barokah Mingguan
 - c. **Bidang Pendidikan** (Pengajian Kitab kuning tematik; Bengkel Karya Tulis untuk Siswa Sekolah; Diskusi Bulanan; Bimbingan Belajar Perpustakaan mini untuk anak-anak).

Isam Aswaja dan bermadzhab Syafi'ie, namun disisi lain seringkali menunjukkan "keberingasan" dalam beberapa aksi nahi mungkar. Selengkapnya bisa dilihat pada Tata Sukayat, *Radikalisme Islam atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam*, dalam Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Volume 12 Nomor 1 (2018) 1-26. Diakses pada <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/1886/1995>. 01 September 2024

Tabel 02
Dampak Hasil Pengabdian

<p>Kesadaran tentang Isu Intoleran</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Kiai NU tidak mudah terjebak isu yang mengatasnamakan agama •Kiai NU Memahami arus isu Intoleransi dan kepentingannya •Kiai Melek Arus Media Sosial
<p>Manajerial Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan terarah dan terencana •tidak ada tumpang tindih kegiatan •Penyatuan Isu dan Gerakan bersama
<p>Bentuk Kegiatan pasca Penampungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Ubudiah Keagamaan •Pengembangan Ekonomi •Pendidikan dan Pelatihan •Pengembangan perpustakaan Masjid

5. Pembahasan; Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Benteng Gerakan Islam Radikal

Khikmawati menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat fungsi utama masjid: *Pertama*, Tempat beribadah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan pada Allah. *Kedua*, fungsi etik, moral. *Ketiga*, sosial dan *Keempat*, fungsi keilmuan dan pendidikan (Khikmawati, 2020). Fungsi sosial yang dimaksud termasuk didalamnya bidang perekonomian dan juga politik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam.

Gerakan Islam Transnasional yang berpaham Radikal telah masif menguasai berbagai masjid di Indonesia untuk memudahkan tercapainya tujuan mereka, menegakkan sistem ad-daulah al-Islâmiyyah dengan sistem Khilafah (Fitria et al., 2021). Tindakan itu, tentunya dapat berpotensi merusak tatanan kenegaraan Indonesia yang diperjuangkan susah payah oleh para ulama dan para pejuang kemerdekaan NKRI.

Sementara itu, Dedy Sunanto menyimpulkan Pembinaan masyarakat (jamaah) sangat tepat bila dilakukan melalui institusi masjid (pusat ibadah) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik pada bidang ibadah (Susanto, 2016), pendidikan, kesehatan, sosial dan perekonomian. Untuk itu, melihat peran sentral masjid yang begitu tinggi, maka diperlukan pelatihan dan pembinaan bagi takmir (pengelola) masjid melalui peningkatan wawasan keislaman dan keterampilan berorganisasi (Falah et al., 2022), sehingga mereka memahami betul tentang peran sentral masjid.

Dengan cara ini, masyarakat akan mudah tersentuh dan tertarik untuk mengikuti kajian-kajian mereka. Saat simpati masyarakat mereka dapatkan, secara perlahan mereka paham-paham radikal mereka sisipkan dalam setiap kajian dan dakwahnya. Tentunya, melihat adanya golongan yang begitu peduli terhadap kegiatan masjid masyarakat dengan mudahnya akan simpati dengan mereka.

Umumnya, gerakan Radikalisme memiliki satu tujuan yakni tegaknya Daulah Islamiyah sehingga nantinya bisa menerapkan hukum Islam secara kaffah. Untuk menerapkan hal itu, mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan baik pada institusi negara setempat, maupun pada sesama umat Islam yang dianggapnya penghalang tujuan tersebut.

Secara mendetail tentang ciri dan pola pemikiran Islam radikal dengan menitikberatkan pada kerangka, antara lain: a) Dasar negara (termasuk Indonesia) harus menggunakan hukum Islam b) konstitusi negara harus berbasis syariah Islam; c) Tuhan memiliki hak penuh untuk menentukan kedaulatan politik; d) Negara Islam harus berada dalam satu pemerintahan dan tidak memiliki batasan politik atau regional (kedaerahan); dan e) prinsip syûra (musyawarah) berbeda dengan ide dan prinsip demokrasi (Muhtarom et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia ada beberapa Ormas yang memiliki visi tegaknya Khilafah Islamiyah (Negara Islam) dan menolak sistem Demokrasi Pancasila (Putra et al., 2024 dan), karena dianggapnya tidak memiliki dalil serta hujjah yang kuat untuk dijadikan sebagai Ideologi dan Azas Negara (Zamani & Hamidah, 2021). Beberapa ormas tersebut antara lain: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Setia, 2021), Jamiyah Ansharut Tauhid (JAT) (ABDULLAH, 2020), Front Pembela Islam (FPI) (Minan, 2023), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Angela & Achmad, 2024).

Berdasarkan hasil survie Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa 41 Masjid di lingkungan BUMN terpapar radikalisme. Ini membuktikan bahwa infiltrasi yang dilakukan ormas radikal telah menyasar ke berbagai lembaga termasuk menguasai masjid-masjid besar di negeri ini.

Dalam Buku Ilusi Negara Islam pun dijelaskan secara mendetail bahwa infiltrasi ormas radikal tidak sebatas pada masjid besar, namun juga menyasar masjid-masjid basi NU dan Muhammadiyah di perkampungan. Ini membuktikan bahwa geraka mereka telah begitu masif dan tidak boleh dipandang remeh (Arifin, 2021). Pola gerakan yang mereka bangun, terutama sejak 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah begitu masif dan mengakar kuat di masyarakat.

Sumenep memang dikenal sebagai basis masyarakat NU yang sangat kental, namun rupanya infiltrasi pemahaman-pemahaman Islam radikal pun masuk secara masif sehingga benih-benih tersebut mulai mengakar dengan kuat. Hal ini disadari sepenuhnya oleh beberapa kiai Muda di Sumenep. Sebagaimana ungkapan A Tirmidzi Mas'od, salah satu kiai muda di Gapura mengaku prihatin dengan "tercurinya" beberapa masjid NU tersebut. Bagi beliau, ketika masjid sudah dikuasai oleh orang-orang yang berpaham "Islam Radikal" itu berarti, bahwa masyarakat di sekitar masjid tersebut juga dikuasai. "NU tidak bisa dikalahkan dan ditundukkan dengan mudah, namun ketika berbagai masjid NU sudah dikapling oleh mereka, maka NU akan kehilangan ruhnya" ungkapnya dengan nada prihatin.

Untuk itu, pihaknya mengaku berbahagia dengan adanya kegiatan pemberdayaan berbasis masjid ini sehingga benar-benar mampu menanamkan kesadaran di tengah – tengah masyarakat bahwa kita sedang menghadapi problem besar dan tidak boleh berdiam diri. Melalui kegiatan pengabdian berbasis masjid yang bertujuan untuk melahirkan lokal leader yang kompeten dalam mengelola kegiatan masjid maka tentunya ke depan, akan sulit bagi pihak -pihak "jihadis" untuk menanamkan pemahamannya di berbagai masjid yang dimiliki oleh warga NU.

Apalagi, berdasarkan pengakuannya, sejak tahun 2015 lalu salah satu ormas yang "diduga" berafiliasi dengan Radikalisme Islam dan cukup aktif "bergerilya" ke masyarakat; utamanya daerah timur daya di Sumenep (Gapura, Batuputih, Batang- Batang dan Dongkek), mengajarkan pentingnya penegakan syariah (formalitas) Islam, serta kewajiban melaksanakan amar makruf nahi mungkar secara tegas. Tokoh tersebut tidak ragu untuk memperkenalkan dirinya sebagai pimpinan Front Pembela Islam (FPI); meski secara formal telah bubar, namun spirit dan nilai – nilai perjuangannya masih mereka jalankan.

FPI memang dikenal sebagai ormas yang "berani" dalam memberantas kemungkaran, melakukan sweping terhadap warung-warung nakal ketika Ramadhan, dan beberapa

aktivitas “keras” lainnya yang mereka akui sebagai bagian dari gerakan dakwah untuk kebangkitan dan kejayaan ajaran Islam.

Khusus di kecamatan Gapura dan Batuputih, masyarakat nyaris tanpa reaksi ketika ketua FPI Sumenep, KH. JM (inisial) memperkenalkan ormas tersebut sebagai organisasi para ulama yang fokus pada gerakan Nahi Mungkar. Sementara gerakan dakwah Amar Makruf adalah tugas NU. Maka tidak heran memang, jika beredar isu di masyarakat luas, bahwa NU dan FPI punya sisi kesamaan, sehingga orang-orang NU aktif di FPI dianggap hal lumrah dan tidak terjadi masalah.

Terkait hal ini, Ruslan (pengurus Takmir Majid Nurul Anwar) menuturkan jika fenomena ini tidak direspon dengan serius oleh pengurus NU, bukan mustahil dalam 2-4 tahun yang akan datang orang-orang yang bersimpati dan terlibat aktif dalam FPI akan semakin banyak. Apalagi sosok KH. JM merupakan bagian dari keluarga besar Ponpes besar dan tertua di Madura yang memiliki banyak alumni di Gapura. Gerakan beliau nyaris tanpa perlawanan.

Hal demikian dibenarkan oleh KH. M. Syahid Munawar selaku ketua MWC NU Gapura bahwa banyak pengurus NU, terutama di basis ranting dan anak ranting yang terpaksa “hadir” pada forum-forum kajian yang dilaksanakan FPI karena merasa tidak “enak” pada sosok KH. JM yang notabene adalah guru mereka ketika dipondok. Termasuk para kiai kampung, yang mengelola muhalla, masjid serta Madrasah Diniyah atau pesantren kecil di daerahnya merasa enggan untuk melakukan perlawanan. Padahal mereka adalah basis utama eksistensi NU di masyarakat. Merekalah para penjaga tradisi, amaliah dan jamiyah ke-NU-an.

Kondisi ini membutuhkan tindakan nyata baik dari pengurus struktural NU maupun dari pihak-pihak yang peduli terhadap perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Sebab, NU senantiasa menjadi ormas terdepan dalam membela, mempertahankan kejayaan Indonesia. Bila basis NU terkikis, bukan tidak mungkin masyarakat yang setia terhadap NKRI akan semakin berkurang.

Apalagi diakui atau tidak, FPI dan HTI memang secara resmi telah dibubarkan, namun gerakan orang-orangnya yang sebelumnya terlibat di kepengurusan masih tidak menyerah untuk melanjutkan perjuangan. Bagi mereka, ormas itu resmi atau tidak, yang penting kegiatan dakwah tetap bisa mereka lanjutkan. Maka dalam banyak kesempatan, mereka masih menyerukan pentingnya penegakan “syariat Islam kaffah” sesuai terminologi mereka dan tidak menolak adanya keinginan untuk tegaknya sistem khilafah di Indonesia.

Maka dengan demikian, mempertahankan basis NU bisa dimaknai sebagai upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Inilah satu poin penting perlunya adanya pendampingan dan pemberdayaan terhadap pengurus anak ranting NU yang bertugas dalam memakmurkan masjid di setiap dusun atau pedesaan.

Bila para pengurus anak ranting NU aktif dan memiliki kompetensi yang mapan dalam mengelola kegiatan keagamaan masjid sehingga lebih variatif dan inovatif, maka pintu infiltrasi gerakan Islam transnasional akan tertutup dengan sendirinya. Masyarakat akan senantiasa terjaga dan tetap dalam barisan tradisi NU yang menyejukkan, menenangkan, dan mendamaikan dalam bingkai NKRI.

6. Penutup

Pemberdayaan dan Pendampingan Masjid dengan segala aspeknya akan senantiasa menjadi tema menarik untuk didiskusikan. Jika sampai saat ini, masjid masih menjadi pusat kegiatan ritual keagamaan semata, maka dimasa depan Masjid perlu dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan perekonomian sehingga benar-benar menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

Masjid adalah simbol dari kondisi masyarakat dalam dimensi sosial dan keagamaan. Jika masjid makmur, maka itu menandakan bahwa masyarakat hidup dalam keadaan

damai dan sejahtera. Kegiatan pendampingan yang kami lakukan baru awal untuk mengembalikan peran masjid yang utuh dan kompleks, karena itu kajian peran masjid sebagai pusat kegiatan masih perlu untuk digali lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDULLAH, A. (2020). DINAMIKA GERAKAN RADIKAL ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS JAMAAH ANSHARUT TAUHID). <https://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/21524>, 2020. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21524>
- Angela, D., & Achmad, R. A. (2024). Islamisme Utopian di Indonesia Pasca Orde Baru: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 6(1), 42–58.
- Arifin, F. (2021). Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 4, 2021, 542.
- Aula, W. S. (2023). STRATEGI POLITIK TARBIYAH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Universitas Indonesia). <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6615>
- Az, M. R. A., Ghozali, S., Darmawan, D., Majid, A. B. A., Wibowo, A. S., & Khayru, R. K. (2024). Peran Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Keagamaan. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(2), 57–67.
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry*. Routledge.
- Danarahmanto, P. A., Permatasari, R. W., Sariwanodja, E. S. N., & Purwoko, S. D. (2022). Peran Inovasi untuk Meningkatkan Literasi Masyarakat Melalui Pengembangan Perpustakaan Masjid Al Jarwal Ar Rahman Purwakarta. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(4), 1979–1990.
- Darmawan, D., & Marlin, S. (2020). Peran Masjid Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/kahpi.v2i1.p52-64.9372>
- Faizal, M. A., Arta, A., Ni'mah, J., & Ainur, Z. F. (2023). Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 123–134.
- Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Masjid An-Nur Pojokwatu. *An-Nuur*, 12(2).
- Fathurrohman, M., Mahendra, V. B., Alasykari, D., & Al-Firdaus, M. R. (2024). Pengembangan Moderasi Beragama Bagi Pengajar TPA Dan Takmir Masjid Di Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 104–117. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i1.821>
- Fitria, S., Sa'diyah, Z., & Rofi'ah, F. Z. (2021). The influence of learning the book of hidayatus shibyan on the understanding of tajwid for grade 5 students Mi Al Rosyid. *PROSIDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC LAW, EDUCATION AND HUMANITY*, 103. https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Ichsan/publication/357699372_The_1st_ProSIDing_International_Conference_on_Islamic_Law_Education_and_Humanity_Contemporary_Legal_and_Education_Interpreterati_on_Multy_Perspectives/links/61dbb2b0da5d105e552eef1a/The-1st-ProSIDing-International-Conference-on-Islamic-Law-Education-and-Humanity-Contemporary-Legal-and-Education-Interpreterati-Multy-Perspectives.pdf#page=107
- Gaus AF, A. (2019). CONVEY REPORT; Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, Dan Khatib. *CSRC UIN Jakarta*, Vol. 21 No. 11 Tahun 2019. <https://www.csrc.or.id/storage/archive/1641183300.pdf>
- Khikmawati, N. (2020). Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 215–232.

- Lubis, E. S. D. D. (2015). Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia. *SUHUF*, 27(2), 158–168.
- Manik, E. S., & Hasanuddin, H. (2018). Strategi Politik Hizbut Tahrir dalam Menegakkan Khilafah Islam di Indonesia. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 61–96.
- Masamah, U. (2020). Masjid, Peran Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat (Optimalisasi Peran Masjid Darussalam Kedungalar Ngawi Responsif Pendidikan Anak). *Mamba'ul'Ulum*, 69–92. <https://doi.org/10.54090/mu.7>
- Minan, J. (2023). Front Pembela Islam (Fpi): Antara Civil Society Dan Gerakan Islam Radikal Di Indonesia. *Kappemi/ STISIP Banten Raya*, 3(1). <http://kappemi.stisipbantenraya.ac.id/index.php/kappemi/article/view/34>
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: Konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=SdYeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ali+Muhtarom,+dkk.,+Moderasi+Beragama:+Konsep,+Nilai,+dan+Strategi&ots=4yaRGO01Sm&sig=abRIFnu8LEvKoMeQSDMZugdwm4I>
- Ni'mah, S. I. (2021). *Manajemen Pengelolaan Masjid Agung Baitunnur Pati Jawa Tengah dalam Menjaga Stabilitas Kemakmuran Jamaah* [PhD Thesis, IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6173>
- PAR, A. (n.d.). METODOLOGI PAR. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, 1.
- Putra, A., Erdianto, R., & Hidayat, F. (2024). Pandangan Ideologis Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(6), 2581–2600.
- Rusmiati, E. T. (2022). Transformasi Peran Masjid Pada Zaman Modern: Studi Kasus Pada Masjid Agung dan Masjid Al-Azhom Kota Tangerang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 54–60.
- Setia, P. (2021). Atas Nama Islam: Kajian penolakan hizbut tahrir Indonesia (Hti) terhadap pluralisme. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 115–136.
- Shorfana, M. R. (2024). A RESONANCE OF THE METROPOLITAN COMMUNITY TOWARDS THE EXISTENCE OF THE TABLIGH JAMAAH IN THE CITY OF JAKARTA:(Case Study at Markaz Al-Muttaqien Ancol). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 53–63.
- Susanto, D. (2016). Penguatan Manajemen Masjid Darussalam Di Wilayah RW IV Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 15(1), 175–206.
- Utami, D. A., Ilyas, D., & Hidayat, R. (2024). *Histori Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam di Zaman Rasulullah Saw*. 3(1), 1–10. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/1181>
- Zada, K. (2011). Gerakan Radikalisme Dalam Formalisasi Syariat Islam di Jawa Barat. 2011.
- Zamani, D. A., & Hamidah, T. (2021). Islam dan Pancasila dalam perdebatan ormas-ormas Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 28–43.